



**Peran Dinas Lingkungan Hidup Mengenai Izin Lokasi Pembangunan
Perumahan Daerah Pegunungan di Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay
Kabupaten Bandung**

*The Role of the Environment Agency regarding the permit for the location of the
development of mountainous regional housing in Bumiwangi Village, Ciparay
District, Bandung Regency*

Annisa Nurkhalifah^{1*}, Rifi Rivani Radiansyah²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung

Email: annisanurkhalifah31@gmail.com

Article Info

Abstract

Article history :

Received : 18-08-2024

Revised : 23-08-2024

Accepted : 26-08-2024

Published : 28-08-2024

Housing development in mountainous areas continues to grow due to the high demand from the community for cheap subsidized housing, so that the private sector tries various ways to fulfill the community's desires. What are the efforts of the Environmental Service in licensing development in mountainous areas. The theory used is the theory according to Hendropuspito, namely expected roles (Expected roles), and actual roles (Adjusted roles). The method used is a descriptive qualitative approach method. Data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation studies. The results of the study are that the Environmental Service has an important role in addition to supervising, the environmental service also provides a permit letter whether a development in the highlands is feasible to be built as a long-term building. And besides that, before the development is carried out, the water channel must be considered, so that it can pass the development permit. And the Environmental Service should usually prefer development permits, especially in the highlands, namely mountains.

Keywords : Role, Environmental Service, Location Permit, Housing Development

Abstrak

Pembangunan perumahan di daerah pegunungan terus berkembang karena banyaknya permintaan masyarakat dengan rumah subsidi murah, sehingga pihak swasta mengupayakan berbagai cara agar terpenuhinya keinginan masyarakat. Apakah upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam perizinan pembangunan di daerah pegunungan. Teori yang digunakan adalah teori menurut hendropuspito yaitu *expected roles* (Peran yang diharapkan), dan *actual roles* (Peran yang disesuaikan). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran penting selain mengawasi, dinas lingkungan hidup juga yang memberikan surat perizinan apakah suatu pembangunan di dataran tinggi memiliki kelayakan untuk di dirikan sebuah bangunan yang berjangka panjang. Dan selain itu pula sebelum dilakukannya pembangunan harus diperhatikan saluran air, sehingga bias lolos untuk perizinan pembangunan. Dan seharusnya Dinas Lingkungan Hidup biasa lebih memilih dalam perizinan pembangunan terutama di dataran tinggi yaitu pegunungan.

Kata Kunci : Peran, Dinas Lingkungan Hidup, Izin Lokasi, Pembangunan Perumahan



PENDAHULUAN

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal serta izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal. Proses memperoleh perizinan ini melibatkan beberapa lembaga pemerintah di tingkat lokal dan regional. Izin lokasi diperlukan untuk berbagai kegiatan termasuk pertambangan, penebangan, penggunaan pertanian, dan pembangunan perumahan. Dalam hal ini, pemberian izin lokasi juga penting untuk menciptakan rencana tata ruang wilayah yang serasi, selaras, dan seimbang sekaligus memerlukan pengarah dan pengendalian.

Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi, yang dapat menghubungkan daerah pegunungan terpencil ke seluruh negeri. Pemerintah juga perlu mempromosikan praktik pertanian dan pariwisata berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah pegunungan. Selain itu, pengembangan kawasan pegunungan juga harus memperhatikan keunikan aspek sosial budaya kawasan tersebut. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pembangunan yang diusulkan sejalan dengan kebijakan lingkungan regional dan nasional.

Dinas Lingkungan Hidup memainkan peran penting dalam menerbitkan izin lokasi pembangunan perumahan di wilayah Pegunungan. Izin ini harus memenuhi berbagai persyaratan dan syarat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, terkadang terjadi kecurangan dalam perizinan lokasi yang dapat menyebabkan dampak negatif, seperti bencana banjir bandang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mengevaluasi kembali terhadap lingkungan karena masih banyak perumahan yang dibangun di daerah pegunungan sehingga tidak ada resapan air dan akhirnya banjir. Pemerintah perlu memaksimalkan dan tegas dalam hal lingkungan terutama permasalahan izin lokasi pembangunan di daerah pegunungan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemeliharaan lingkungan dan kebijakan perencanaan yang bijaksana dalam pembangunan daerah pegunungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam izin lokasi pembangunan perumahan di Desa Bumiwangi Kecamatan Ciparay. Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi, lensa penafsiran/teoretis, dan studi tentang permasalahan riset yang meneliti bagaimana individu atau kelompok memaknai permasalahan sosial atau kemanusiaan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, dengan informan dari pemerintahan, masyarakat sekitar perumahan, dan staff pengembang. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data induktif. Penelitian dilaksanakan di Bumiwangi, Kec. Ciparay Kabupaten Bandung Jawa Barat 40381 dengan lamanya penelitian dari bulan Maret s.d Agustus 2021. Waktu tahapan penelitian mencakup pengajuan judul dan acc judul skripsi, bimbingan skripsi, perumusan izin penelitian, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penyusunan laporan proposal skripsi, dan sidang akhir skripsi (Peneliti, 2023).



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas kondisi kantor Desa Bumiwangi pada tahun 2023 dan pengolahan data yang diperoleh melalui penelitian di Desa Bumiwangi. Desa ini terletak di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah 433,118 Ha, jumlah penduduk 18.111 jiwa, 22 RW, dan 106 RT. Desa Bumiwangi memiliki batas wilayah administrasi dengan desa lain di sekitarnya. Desa ini terletak di dataran rendah dan memiliki beberapa kompleks perumahan. Namun, pembangunan perumahan terbesar ada di daerah dataran tinggi. Terdapat enam perumahan di daerah dataran tinggi dengan pengembang yang berbeda.

Dalam hal lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2021 adalah "Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta sinergi Pembangunan Perdesaan berlandaskan Religius, Kultural adalah Peningkatan kualitas lingkungan melalui Program Raksa Desa."

Dalam hal lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kegiatan berbasis sistem nilai, seperti pengelolaan sampah berbasis rumah tangga. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung juga mewajibkan setiap orang untuk menanam dua batang pohon.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan izin lokasi pembangunan perumahan di daerah pegunungan masih kurang sesuai dengan harapan masyarakat, yang berpotensi mengakibatkan bencana alam. Masyarakat berharap pemerintah desa atau yang mengeluarkan perizinan lebih tegas karena ditakutkan terjadinya bencana alam, apalagi daerah tersebut pernah terkena bencana alam. Selain itu, peneliti menemukan kecurangan dalam pemberian izin perizinan kepada masyarakat. Masyarakat diberikan sejumlah uang dan dipaksa untuk meizinkan pembangunan perumahan ini.

Dalam hal ini, pemerintah desa telah mengetahui adanya suap kepada masyarakat namun mereka tidak berlaku tegas dan melakukan tindakan apapun kepada pihak pengembang. Hal ini menyebabkan pertambahan pembangunan perumahan di daerah pegunungan di Desa Bumiwangi. Akibat dari pertambahan pembangunan perumahan di daerah pegunungan, masyarakat pemukiman sekitar perumahan terkena dampak akibat minimnya resapan air dan lahan terbuka hijau semakin sedikit.

Masyarakat berharap pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup, segera menangani kasus ini dan mengawasi beberapa pengembang yang ingin membangun perumahan di daerah pegunungan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memberikan sanksi terhadap pemerintah desa agar melarang terjadinya aksi suap untuk mempermudah perizinan.

Dalam hal ini, pemerintah desa memberikan tanggapan terkait kecurangan izin lokasi, namun tidak memberikan sanksi terkait pelanggaran perizinan. Tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup pun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan perizinan



lokasi pembangunan perumahan di daerah pegunungan juga masih kurang optimal sesuai dengan harapan masyarakat.

Kesimpulannya, diperlukan koordinasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup, DPUPT, masyarakat, dan pengembang, untuk merumuskan kebijakan yang melindungi lingkungan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara seimbang.

KESIMPULAN

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modalnya. Proses perizinan kompleks melibatkan beberapa izin pemindahan hak. Identifikasi masalah meliputi kecurangan uang atau suap terhadap masyarakat dan banjir akibat pembangunan perumahan di daerah pegunungan. Landasan teori dari Hendropuspito digunakan. Penelitian ini kualitatif deskriptif, dengan peran Dinas Lingkungan Hidup menganalisis kelayakan lingkungan. DPUTR membantu dalam penerbitan nomor perizinan. Pemerintah hanya memberikan teguran dan peninjauan ulang terhadap pelanggar lingkungan, tanpa sanksi berat. DLH berperan dalam penelitian izin lokasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Halm. 87

Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR. Halm. 102

Data Gambaran Umum DLH

Data pendukung desa Bumiwangi

<https://lingkunganhidup.bandungkab.go.id>

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5227680/banjir-bandang-terjang-ciparay-bandung-152>

https://linktr.ee/bidangtatalingkungan?lt_utm_source=lt_admin_share_link#308755023k-terkena-dampak

<https://sikumbang.tapera.go.id/lokasi-perumahan/SOR2920132021T001>

<https://www.bandungkab.go.id/uploads/20190315081648-pt-agung-mas-jaya-daksa.pdf>

Pasal 1 butir 1, 6, 7, dan 4 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Pasal 35 ayat (2)

Perda No 5 TAHUN 2018 Kabupaten Bandung

Perme LHK no 4 tahun 2021

Pertanahan Nasional R.I (Nomor 5 Tahun 2015) tentang izin lokasi, Ketentuan umum Pasal 1 :



Rachmawati, Alfi. 2015 Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal Untuk Pembangunan Perumahan.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Alfabeta.

UUD No 33 tahun 1945

Yunia, Selly. 2016 Izin Lokasi Sebagai Syarat Perolehan Hak Atas Tanah Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan.